



Bali Dikerubuti KSPN dan Reklamasi

Ditetapkannya 11 kawasan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025, nomor urut 84, yang dilengkapi dengan topografi kawasan-nya. Peraturan ini diundangkan pada tanggal 2 Desember 2011, dan masuk dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125.

Oleh

Tjokorda Bagus Putra Marhaendra

Guna memberikan pertimbangan kepada pemerintah pusat mengenai KSPN, di Bali telah dibentuk Tim Pengkaji 11 KSPN. Tim ini kemudian mengeluarkan rekomendasi, di antaranya: kawasan Besakih, Gunung Agung dan sekitarnya, serta Taman Nasional Bali Barat (TNBB) dan Pulau Menjangan dikeluarkan dari Lampiran PP No. 50 Tahun 2011 tentang KSPN. Rekomendasi yang dikirim kepada Menteri Pariwisata (Menpar) itu mendapatkan respons yang menyatakan bahwa Menpar tidak setuju dengan semua rekomendasi tersebut. Namun, di sisi lain dia pun menyatakan bahwa penolakan tersebut bukanlah keputusan menteri tetapi keputusan presiden (BP, 4/8). Hal ini tentu mengundang reaksi negatif masyarakat Bali, yang saat ini masih berkebutakan dengan persoalan reklamasi Teluk Benoa, karena belum jelas keputusan akhirnya.

Fenomena tersebut berpotensi menjadi ajang *politicking* para calon kepala daerah yang maju pada pilkada serentak nanti. Semoga tidak demikian, masyarakat jangan sampai menjadi korban janji-janji populis. Hendaknya memilih pemimpin yang baru dengan kecerdasan dan nuraninya.

Lalu mengapa Tim Pengkaji 11 KSPN merekomendasikan agar Besakih dan yang lainnya dikeluarkan dari KSPN? Setidaknya ada dua aspek yang menjadi

kan sebagai dasar, yakni aspek normatif dan ancaman sosial budaya.

Secara normatif, definisi KSPN dari Peraturan Pemerintah itu (Pasal 1, ayat 6) adalah, "kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan." Berarti kawasan tersebut telah ditetapkan sebagai potensi pengembangan pariwisata nasional. Adapun jenis pariwisata yang cocok untuk dikembangkan di sana mengacu pada budaya, pemberdayaan alam dan daya dukung lingkungan hidupnya.

Dalam pemberdayaan alam dan daya dukung lingkungan hidup, pemerintah membaginya menjadi tiga daya tarik utama pariwisata, yakni daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia. Persoalannya, yang telah berjalan selama ini di Bali, ketiganya selalu berkebutakan di tempat tujuan pariwisata mana pun yang ada di Bali. Tidak ada alokasi dukungan definitif untuk satu daya tarik pariwisata. Karena itu, setiap infrastruktur yang dibangun untuk tujuan pariwisata pada akhirnya akan dibebani oleh dampak samping dari tujuan utama pariwisata itu. Contoh klasiknya adalah perken-

Edisi : Senin, 10 Agustus 2015

Hal : 4



Kasus Korupsi di Undiksha Singaraja Tiga Tersangka Lain Menunggu Ditahan

Denpasar (Bali Post) -

Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali sudah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi atau mark up pembangunan FOK Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singaraja. Namun, pihak penyidik menyatakan bahwa kemungkinan tersangka akan bertambah. Dari lima tersangka itu, dua di antaranya sudah dilakukan penahanan dan tiga lainnya belum.

Kasipenkum Humas Kejati Bali, Ashari Kurniawan didampingi Kasi Penuntutan Gede Arthana, Jumat (7/8) kemarin, belum mau memastikan soal kemungkinan bertambahnya tersangka kasus ini. "Soal Undiksha, belum ada perkembangan. Soal penahanan, kita masih menunggu petunjuk pimpinan," katanya.

Namun demikian, sampai saat ini penyidik masih fokus melakukan pemberkasan terhadap dua tersangka yang sudah ditahan, yaitu I Wayan Suarsa (Pejabat Pembuat Komitmen) dan I Nyoman Mustiara (makelar tanah).

"Saat ini fokus pemberkasan dua tersangka ini supaya bisa dilanjutkan ke proses selanjutnya," tandas Ashari.

Selain Suarsa dan Mustiara, tiga tersangka lainnya dalam kasus ini yaitu Nengah Nawa (Kepala Desa Jineng Dalem), Sri Putu Sugirinata (Kabag Perencanaan Undiksha) dan I Dewa Komang Indra (makelar tanah) tinggal menunggu waktu untuk menyusul dua tersangka lainnya masuk bui. Sebelumnya diberitakan, kelima tersangka yaitu I Wayan Suarsa (Pejabat Pembuat Komitmen),

I Nyoman Mustiara (makelar tanah) Nengah Nawa (Kepala Desa Jineng Dalem), Sri Putu Sugirinata (Kabag Perencanaan Undiksha) dan I Dewa Komang Indra (makelar tanah) diduga melakukan *mark up* harga tanah dari harga Rp 6,5 juta per are menjadi Rp 18 juta per are. Tanah yang digunakan untuk Kampus Undiksha ini baru dikuasakan menjual oleh kelima tersangka. Lalu, tanah ini akhirnya dilunasi setelah alokasi dana Rp 7 miliar untuk pengadaan lahan ini cair. Dari perhitungan inilah ada kerugian negara mencapai Rp 3 miliar. (kmb37)



Komisi XI DPR-RI dan Tiga Kementerian Sosialisasi Kebijakan Dana Desa di Badung

KOMISI XI DPR-RI bersama tiga kementerian yakni Kementerian Keuangan, Kemendagri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI memilih Kabupaten Badung sebagai tempat penyelenggaraan Sosialisasi Kebijakan Dana Desa. Sosialisasi berlangsung di Ruang Kertha Gosana Puspem Badung, Jumat (7/8) kemarin. Acara dibuka Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan RI Dr. Hadiyanto, S.H., L.L.M., C.I.T.P. serta dihadiri Penjabat Bupati Badung Ir. I Nyoman Harry Yudha Saka, M.M., anggota Komisi XI DPR-RI I Gst. Agung Rai Wirajaya, S.E., M.M., Staf Khusus Kementerian Keuangan Arif Budimanta, tim sosialisasi dari ketiga kementerian. Hadir pula anggota DPRD Badung Sutarma, Sekda Badung Kompyang R. Swandika, para camat, serta perbekel se-Badung.

Penjabat Bupati Badung Harry Yudha Saka menyambut baik atas dipilihnya Badung sebagai penyelenggaraan sosialisasi kebijakan dana desa. Berkenaan dengan dana desa yang sempat menjadi isu sentral bahkan sempat menjadi polemik, diharapkan akan memberi pemahaman yang sama sehingga berbagai tafsir yang sempat muncul selama ini dapat diluruskan. "Kami menyambut baik sosialisasi kebijakan dana desa ini karena sangat sejalan dengan komitmen kami untuk menjadikan desa sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Badung. Kami harapkan, melalui sosialisasi ini dapat mempercepat terjalannya komunikasi, koordinasi dan pemahaman yang utuh terhadap kebijakan dana desa," jelasnya.

Dikatakannya, besarnya perhatian pemerintah terhadap eksistensi desa, ditun-

jukan dengan telah disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa dan peraturan pelaksanaannya. Tentu, hal ini mengandung konsekuensi akan semakin bertambah kuatnya daya tawar desa dalam sistem pemerintahan di Indonesia, semakin besarnya kewenangan desa dan semakin besarnya sumber pendapatan yang dikelola oleh desa. Tahun 2015 ini APBD Badung yang diarahkan untuk desa meliputi; dana desa Rp 5,7 miliar lebih, Alokasi Dana Desa (ADD) Rp 34,5 miliar lebih, dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebesar Rp 237,8 miliar lebih. Total dana yang diterima oleh masing-masing desa di Kabupaten Badung antara Rp 4,6 miliar lebih sampai Rp 9,7 miliar lebih.

Sekjen Kementerian Keuangan RI Hadiyanto menyampaikan, sosialisasi ini digelar sebagai tindak lanjut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya terkait dengan dana desa. Pemerintah telah menetapkan PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa yang bersumber dari APBN sebagaimana diubah dengan PP No. 22 Tahun 2015. Sesuai PP 22 ini, penggunaan dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Realisasi penyaluran dana desa tahap I yang telah disalurkan ke kabupaten/kota sudah mencapai Rp 8,173 triliun. Dana ini setara dengan 98,408 persen dari alokasi dana desa yang seharusnya disalurkan tahap I, yaitu Rp 8,306 triliun. Realisasi dana desa Rp 8,173 triliun tersebut disalurkan kepada 433 dari 434 kabupaten/kota penerima dana desa. "Total anggaran desa secara nasional untuk tahun 2015 Rp 20,7 triliun. Masing-masing desa akan menerima Rp 254 juta," terangnya.

Khusus untuk Kabupaten Badung, dana desa tahap I telah disalurkan, 26 Juni 2015 Rp 2,293 miliar yang merupakan 40 persen dari alokasi dana desa TA 2015 dan total yang diterima Badung tahun 2015 sebesar Rp 13,826 miliar. (ad615)



SOSIALISASI - Penjabat Bupati Badung I Nyoman Harry Yudha Saka menerima Komisi XI DPR-RI bersama tiga kementerian yakni Kementerian Keuangan, Kemendagri serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, terkait sosialisasi kebijakan dana desa.

Edisi : Sabtu, 8 Agustus 2015

Hal : 3



Pertumbuhan Ekonomi Karangasem Terendah di Bali



RAPAT - Pimpinan satuan kerja perangkat daerah di Karangasem mengikuti rapat anggaran untuk tahun 2016, kemarin.

Amlapura (Bali Post) - Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karangasem tergolong terendah di Bali. Karena itu, penyumbang pendapatan regional domestik bruto (PRDB) terbesar yakni sektor pertanian, mestinya digenjut dengan pemberian anggaran yang lebih besar.

Hal itu disampaikan anggota DPRD Karangasem Komang Sudanta, S.E. saat rapat tim anggaran di DPRD Karangasem, Jumat (7/8) kemarin. Sudanta menilai, penyebab paling rendahnya pertumbuhan ekonomi di Karangasem, karena sektor pertanian yang menjadi prioritas pertumbuhannya paling lambat. Padahal, sektor pertanian masih menjadi penyumbang PDRB tertinggi. Sebanyak 49 persen dari penduduk Karangasem bekerja di sektor pertanian dalam arti luas. "Karena sebagian penduduk sebagai petani dan pertanian masih menjadi penyumbang PDRB tertinggi, mesti diupayakan bagaimana agar sektor pertanian lebih diperhatikan untuk diberikan anggaran lebih besar. Petani melalui kelompok tani

mesti dibantu," katanya.

Menurut Sudanta, tak hanya target pertumbuhan ekonomi yang mestinya dikedjar, tetapi juga harus ada pemerataan. Selama ini, timpang pendapatan antara petani dengan pekerja di sektor jasa dan industri. Masalah ketimpangan pendapatan ini menyebabkan kemiskinan masih tinggi.

Sudanta asal Desa Tegallinggah mengatakan, jika dibandingkan, ternyata Jembrana dan Gianyar dalam beberapa tahun terakhir ini, terlihat tak terdampak inflasi. Selain itu, kedua kabupaten itu mampu menurunkan angka penduduk miskinnya secara signifikan. Padahal, APBD Karangasem tak berbeda jauh dengan APBD Jembrana dan Gianyar. Di mana APBD Karangasem, Rp 1,2 triliun, sementara Gianyar dan Jembrana Rp 1,6 triliun dan Rp 1 triliun lebih.

Dari catatan *Bali Post*, komposisi antara belanja tak langsung (BTL) dan belanja langsung (BL) APBD Jembrana terlihat sangat mendukung. BTL Jembrana hanya Rp 59 miliar, sementara BL Rp 89 miliar dan belanja modal sangat besar mencapai

Rp 875 miliar.

Sementara itu, Sekda Karangasem Ir. Gde Adnya Mulyadi yang memimpin tim anggaran eksekutif serta Kepala Bappeda Karangasem Ketut Sedana Merta, mengakui tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Karangasem memang terendah di Bali. Sedana Merta mengatakan, pertumbuhan ekonomi Karangasem pada tahun itu berada pada titik nadir. Namun untuk tahun 2014 dan sampai kini, pertumbuhan ekonomi Karangasem dibantah Adnya Mulyadi kalau dikatakan terendah di Bali. "Tahun 2013 dan 2014, pertumbuhan ekonomi Karangasem bukan terendah di Bali, tetapi nomor enam di Bali," katanya.

Sekda Adnya menyatakan setuju guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Karangasem, perlu mendorong sektor pertanian sebagai penyumbang PDRB tertinggi. Namun diakui karena anggaran pertanian langsung menyentuh ke petani, kerap ada kendala. Pengalaman tahun lalu, banyak anggaran tak mampu dilaksanakan, karena terkendala kelompok tani ada yang belum solid dan satuan kerja perangkat daerah yang menanganinya khawatir menjadi masalah hukum ketika anggaran digelontorkan begitu saja.

Adnya mengatakan pihaknya merancang pertumbuhan ekonomi tahun 2016 berkisar 5-6 persen. Terkait itu, anggota DPRD Wayan Swastika, menyatakan tak sependapat jika pertumbuhan ekonomi targetnya tak pasti, dengan menggunakan kisaran 5-6 persen. "Pertumbuhan ekonomi itu harusnya bukan kisaran, tetapi pasti lima atau enam persen. Dulu pertumbuhan ekonomi Karangasem pernah dipatok enam persen," katanya. (013)